

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem Pendidikan Nasional Indonesia merupakan sub sistem dari pembangunan nasional yang mempunyai peranan utama dalam mengembangkan dan membina sumber daya manusia sebagai kekuatan sentral dalam pembangunan. Melalui pendidikan diharapkan akan terbentuk manusia Indonesia yang mempunyai keperibadian dan keterampilan untuk secara mandiri dapat berkiprah ditengah masyarakat. Adanya kontribusi yang signifikan dari pendidikan terhadap pembentukan keperibadian dan keterampilan siswa, mengisyaratkan perlunya penataan dan pembaruan sistem pendidikan. Pembaharuan sistem pendidikan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang dan jenis yang lembaga pendidikan. Sistem pendidikan dapat memberi kontribusi efektif terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang kredibel dan bebas masalah.

Namun demikian diakui bahwa selama ini sistem pendidikan nasional selalu diperhadapkan dengan berbagai masalah. Kondisi ini yang menyebabkan mutu pendidikan merosot. Salah satu diantara sekian banyak permasalahan pendidikan yang sangat prinsipil untuk segera dicarikan solusi adalah masalah kekurangan guru dan distribusi atau penempatan yang tidak merata. Dan penempatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan guru yang berada di sekolah. Depdiknas (2003:1) mengemukakan bahwa kekurangan guru merupakan salah satu kendala yang dialami sekolah dalam melaksanakan fungsinya sebagai salah

satu penyelenggara pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Permasalahan kekurangan guru dan pendistribusian yang kurang merata tersebut telah menjadi masalah klasik yang terpecahkan.

Pembangunan pendidikan di Indonesia mendapatkan perhatian secara serius ditandai dengan sistem pendidikan nasional serta perangkat-perangkatnya. Untuk itu sektor pendidikan perlu mendapat perhatian yang serius dalam mengatasi kebutuhan guru, karena merupakan tanggung jawab yang besar dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memiliki nilai strategis bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. melalui pelaksanaan pendidikan yang optimal, indikator tingginya kualitas pendidikan akan menggambarkan sejauh mana potensi kualitas pendidikan suatu daerah.

Untuk dapat melaksanakan pendidikan secara efektif diperlukan manajemen yang profesional dari para penentu kebijakan pendidikan. Realita yang ada tidak dapat dipungkiri bahwa manajemen pendidikan di Indonesia masih menggunakan sistem tambal sulam yang mengakibatkan munculnya berbagai masalah kronis. Meskipun berbagai usaha telah dilakukan, namun masih banyak permasalahan prinsipil yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas antara lain keterpurukan sumber daya manusia, komitmen pemerintah, sarana dan prasarana, tenaga guru yang belum memadai serta penyebarannya yang kurang merata.

Permasalahan kekurangan guru ini semakin merebak pada masa transisi perubahan pemerintah dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Untuk mengatasi kekurangan guru tersebut pemerintah meluncurkan serangkaian program yakni program jangka pendek seperti: pengadaan guru bantu, guru

kontrak yang dilakukan melalui perjanjian kerja. Hal tersebut dibarengi dengan pengangkatan guru (PNS) untuk menanggulangi kekurangan guru tersebut yang terjadi pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan.

Untuk mengantisipasi masalah kekurangan guru, pemerintah secara kontinu mengadakan pengangkatan guru (PNS) hampir setiap tahun, yang disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Disamping itu pemerintah mencanangkan pengangkatan guru bantu dan guru kontrak untuk mengantisipasi masalah kekurangan guru. Namun kenyataan sekarang setiap daerah sekolah masih banyak kekurangan guru.

Namun demikian berbagai usaha telah dilakukan secara maksimal, masalah kekurangan guru tetap muncul kepermukaan melalui berbagai fenomena yang dapat dilihat antara lain jumlah guru yang kurang sesuai dengan jumlah siswa dan jumlah kelas. Demikian juga sebagian besar guru lebih berada di daerah perkotaan daripada di daerah terpencil meskipun pemerintah sudah berbagai upaya dalam memberikan kesejahteraan bagi guru terpencil yakni tunjangan untuk guru pada daerah terpencil itu belum dapat menjamin guru betah mengajar di daerah terpencil. Hal inilah yang menyebabkan mutu pendidikan di daerah terpencil menjadi terdegradasi minimnya tenaga pengajar.

Usaha yang dilakukan tersebut belum mencapai hasil yang maksimal karena jumlah guru yang diangkat belum memenuhi kuota rasional yang dibutuhkan oleh setiap sekolah. Kondisi yang lebih memperhatikan distribusi guru lebih terkonsentrasi di perkotaan, sementara daerah terpencil pedalaman sangat membutuhkan guru dimana pada setiap daerah terpencil masih kekurangan guru.

Perhitungan kebutuhan guru yang idealnya khususnya di SMP dan MTS di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato didasarkan atas jumlah kelas dan bukan jumlah siswa. Secara nasional perbandingan yang dipakai adalah 1: 25 yaitu setiap guru mengajar dalam satu kelas adalah 25 orang kenyataan yang ada perbandingan adalah 1: 35 bahkan ada 1:40 dimana setiap mengajar guru 35 siswa dalam satu kelas. Keadaan seperti ini sesungguhnya menimbulkan ketimpangan dalam distribusi beban tugas guru, rendahnya efisiensi pemanfaatan tenaga guru dan pengelolaan sekolah. Namun kenyataan ini cukup dilematis dengan pandangan lain yang menyatakan bahwa perhitingan guru berdasarkan kelas kelihatannya tidak dapat menjamin efisiensi pemanfaatan guru, karena meskipun jumlah siswa di suatu kelas sedikit, tetap ada saja diperlukan satu orang guru. Akibatnya sekolah yang jumlah siswanya lebih sedikit tetap dihitung memerlukan jumlah guru yang sama dengan sekolah yang memiliki jumlah siswa yang banyak. Keadaan demikian akan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi beban tugas guru, rendahnya efisiensi pemanfaatan tenaga guru dan pengelolaan sekolah.

Untuk mengetahui kebutuhan guru disuatu daerah perlunya diadakan analisis kebutuhan guru. Analisis kebutuhan guru dilakukan melalui rangkaian kegiatan analisis proyeksi dan kebutuhan guru. Berbagai realita di atas menunjukkan perlunya analisis proyeksi dan kebutuhan guru. Hal ini mengingat bahwa untuk memperoleh jumlah guru yang memadai diperlukan analisis kebutuhan dan proyeksi yang tepat, tanpa analisis kebutuhan dan proyeksi yang tepat maka akan sulit dalam mengatasi kekurangan guru dan pendistribusian yang tidak merata.

Analisis dan proyeksi kebutuhan guru dapat dilakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu kekurangan guru di sekolah. Strategi yang dapat dilakukan yaitu merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Masaong (2001:91) sebagai berikut: bahwa untuk menghitung kebutuhan guru pada suatu lembaga atau sistem memerlukan data dasar yang mencakup: (1) enrollment sekolah, (2) jumlah jam perminggu yang diterima siswa seluruh mata pelajaran atau mata pelajaran tertentu, (3) beban mengajar penuh guru perminggu, (4) besar kelas yang dianggap efektif untuk menerima suatu mata pelajaran, (5) jumlah guru akan meninggalkan jabatan keguruan, (6) jenis sekolah dan jenjang sekolah yang memerlukan guru, (7) menghitung kebutuhan total guru untuk suatu jenis sekolah atau tingkat sekolah tertentu tidaklah sulit asalkan data dasar yang diperlukan di atas tersedia.

Dengan merujuk pada tehnik tersebut, maka akan diperoleh jumlah guru yang tepat untuk setiap sekolah. Melalui perhitungan ini akan didapat tingkat distribusi guru pada setiap wilayah atau dalam skala kabupaten dan kota. Perhitungan inipun dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah untuk mengatur formasi pengangkatan guru di daerah.

Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan analisis dan proyeksi kebutuhan guru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) khususnya di kecamatan marisa kabupaten pohuwato belum dilaksanakan secara baik. Realita yang diamati menunjukkan bahwa tahapan penempatan guru kurang sesuai dengan kebutuhan. Pengangkatan guru setiap tahun kurang didasarkan pada analisis dan proyeksi kebutuhan yang

tepat. Dalam hal ini jumlah guru diangkat kurang sesuai dengan kebutuhan, pengangkatan guru hanya didasarkan pada pendekatan kekeluargaan bukan didasarkan pada kebutuhan, hasil analisis kebutuhan guru SMPN dan MTS belum secara totalitas, sehingga SMPN dan MTS masih kekurangan guru bahkan belum mendapatkan jatah yang memadai. Penempatan guru masih terkonsentrasi di pusat kecamatan dan kabupaten sedangkan di tempat terpencil belum mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini menyebabkan penyebaran guru menjadi tidak merata. Jumlah guru setiap tahun menyusut karena adanya mutasi yang kurang wajar. Berbagai realita tersebut perlu diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi pelaksanaan. Mencermati realita tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian berjudul Analisis Kebutuhan Guru SMP dan MTs di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran guru perbidang studi SMP dan MTS di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
2. Bagaimana Proyeksi kebutuhan guru perbidang studi SMP dan MTs di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato 2013-2016

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran analisis kebutuhan guru perbidang studi SMP dan MTS di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui gambaran kebutuhan guru perbidang studi SMP dan MTs di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Pohuwato perlu membuat formasi pengangkatan guru sekolah menengah pertama untuk mengantisipasi kebutuhan guru 5 tahun ke depan.
2. Sebagai bahan masukan kepada pengambil kebijakan di Kabupaten Pohuwato perlu membuat formasi pengangkatan guru yang sesuai dengan analisis kebutuhan guru SMP perbidang studi terutama untuk jangka waktu lima tahun kedepan.
3. Sebagai sarana ilmiah bagi pemerhati pendidikan untuk mengkaji dan mengembangkan masalah analisis dan proyeksi kebutuhan.
4. Untuk kepala sekolah dapat membantu sebagai bahan pertimbangan dalam penempatan guru mata pelajaran sesuai disiplin ilmu guna meningkatkan kualitas guru dalam pengembangan mutu pendidikan.